

STANDAR PENJAMIN MUTU PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI DI POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) MAKASSAR DENGAN SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP) JAKARTA

Rukmini¹⁾ Agustina Setyaningsih²⁾ Muh. Agung R³⁾ Yudha Herlambang⁴⁾
Emmy D⁵⁾

Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
Jalan Tentara Pelajar No. 173 Makassar, Kode pos. 90172
Telp. (0411) 361697975; Fax (0411) 3628732
E-mail: pipmks@pipmakassar.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggara pendidikan tinggi di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar dan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan populasi di PIP Makassar dan STIP Jakarta. Teknik pengambilan sampling menggunakan teknik snowball sampling dan didapatkan sampling sebanyak 294. Metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan instrument yang digunakan adalah pedoman wawancara. Pengolahan data menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasilnya adalah sistem penjaminan mutu PIP Makassar dan STIP Jakarta dilaksanakan sesuai dengan prinsip Penjaminan Mutu yaitu menggunakan siklus PDCA. Penerapan sistem penjaminan mutu PIP Makassar dan STIP Jakarta masih dalam tahap pengembangan. dikarenakan implementasi siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) masih menghadapi beberapa kendala diantaranya kesadaran individu dan komitmen seluruh pemangku kepentingan tentang budaya mutu masih harus ditingkatkan,

Kata kunci: Standar, Mutu, Jaminan, Pendidikan Tinggi, PIP Makassar, STIP Jakarta

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini, perguruan tinggi di dunia sedang menghadapi tantangan yang besar yaitu peningkatan kualitas berkelanjutan. Perhatian terhadap perbaikan kualitas pada perguruan tinggi menjadi suatu agenda regional dan nasional. Upaya penjaminan mutu pendidikan di Indonesia ditandai dengan lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Pasal 50 ayat 2 yang menyatakan bahwa Pentingnya penjaminan mutu dalam dunia pendidikan membuat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti)

mengamanahkan pembentukan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) disetiap perguruan tinggi.

Hal ini pula dikuatkan dengan HELTS (Higher Education Long Term Strategy) 2003 – 2010 dan Renstra Kemendiknas 2010 – 2014 yang menyiratkan arti untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan mendorong dibentuknya lembaga penjaminan mutu di perguruan tinggi dan kemudian menjadi salah satu syarat utama untuk dapat berkompetisi dalam berbagai penelitian hibah bersaing atau untuk memperoleh fasilitas lainnya bagi perguruan tinggi (Wahab, 2011).

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, sejak tahun 2016 telah memiliki sebuah sistem penjaminan mutu terintegrasi sebagai standar mutlak yang harus dipenuhi. Namun sistem tersebut belum terimplementasikan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari implementasi standar yang masih terpisah satu sama lainnya. Selama ini dalam menjalankan tugasnya sebagai sebuah unit yang mengawal mutu institusi, SPM PIP Makassar yang terbentuk pada Mei 2011 mengawal seluruh elemen yang ada di PIP Makassar untuk mencapai Sasaran Kinerja Lembaga seperti yang dipersyaratkan pada STIP Jakarta, pihak yang bertanggung jawab terhadap sistem penjaminan mutu adalah Pusat Penjaminan Mutu yang membawahi 4 (empat) unit kerja yaitu: Unit Penjaminan Mutu Internal, Unit Akreditasi dan Sertifikasi, Unit Pangkalan data Perguruan Tinggi, dan Unit Monitoring dan Evaluasi. Sehingga, masing-masing unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan lebih terarah.

2. TINJAUAN TEORI

Penjaminan mutu (*Quality Assurance*), adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga *stakeholder* memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu dalam PP No. 19/2005 Pasal 49 penjaminan kualitas merupakan kegiatan untuk memberikan bukti untuk membangun

kepercayaan bahwa kualitas dapat berfungsi dengan baik (Permendiknas No 19, 2005). Penetapan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi seluruh Perguruan Tinggi melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) telah lama diumumkan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, SPM Dikti ini meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan Akreditasi. Sehingga SPM Dikti merupakan sistem penjaminan mutu internal dan external.

Tujuan penjaminan mutu adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi suatu Perguruan Tinggi, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dicapai melalui penerapan SPMP (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan).

Dalam implementasi SPM serta menjaga *Continuous Quality Improvement* (CQI), perguruan tinggi membutuhkan alat atau sistem yang handal dalam pelaksanaannya, agar proses pelaporan borang, mengukur performa kinerja perunit maupun perorangan dengan KPI (*Key Performance Indicators*) dan proses AMAI (*Audit Mutu Akademik Internal*) menjadi lebih mudah (Sevima, 2017).

Substansi utama Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dilaksanakan dengan pendekatan siklus PDCA (*Plan-Do-Check-Action*) pada proses penyelenggaraan pendidikan.

a. Perencanaan Mutu (*Plan*)

Plan, adanya perencanaan berkaitan dengan perencanaan mutu, meliputi penetapan kebijakan mutu, penetapan tujuan mutu beserta

indikator pencapaiannya, serta penetapan prosedur untuk pencapaian tujuan mutu.

b. Pelaksanaan (*do*)

Do, adanya pelaksanaan dari apa yang sudah direncanakan, maka untuk penjaminan mutu pendidikan, seluruh proses pendidikan termasuk pelayanan administrasi pendidikan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

c. Evaluasi (*check*)

Check, adanya monitoring, pemeriksaan, pengukuran dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pelaksanaan termasuk audit mutu internal.

d. *Action*

Adanya tindak lanjut dan perbaikan dari hasil evaluasi, menyusun rencana, perbaikan dan menyusun laporan pelaksanaan program pendidikan. (Sugeng Listyo & Prabowo, 2009)

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan di PIP Makassar dan STIP Jakarta. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *snowball sampling* dan didapatkan responden sebanyak 294 (147 responden dari PIP Makassar dan 147 responden dari STIP Jakarta).

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan instrument pedoman wawancara yang telah dikembangkan dari teori yang ada.

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Deskripsi Penelitian Berdasarkan Sampel yang Berasal dari PIP Makassar

Berdasarkan instrumen yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada PIP Makassar dimana instrumen tersebut terdiri atas 20 item pernyataan diperoleh data sebagaimana yang dicantumkan pada lampiran 2. Adapun rangkuman hasil analisis deskriptif data penelitian yang telah diperoleh dari sampel yang terdiri dari Taruna PIP Makassar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif Penerapan Rancangan Sistem penjaminan mutu pada PIP Makassar

Statistics		
N	Valid	107
	Missing	0
Mean		71,35
Median		73,00
Mode		65,00
Std. Deviation		12,07
Variance		145,89
Minimum		20,00
Maximum		98,00

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, data yang diperoleh yakni nilai rata-rata (mean) variabel sebesar 71,35 median (nilai tengah) sebesar 73,00 modus (nilai yang paling sering muncul) sebesar 65,00, standar deviasi

(simpangan baku) sebesar 12,7 dan variansi sebesar 145,89. Skor minimum yang diperoleh adalah 20,00 dan skor maksimum adalah 98,00.

Untuk distribusi jawaban responden mengenai penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada PIP Makassar dijabarkan pada tabel 4.2. berikut:

Tabel 4.2. Distribusi Jawaban Taruna PIP Makassar

Intotal

skor	kategori	Frequency	Percent	Valid Percent
20-45	Rendah	3	2,8	2,8
46-71	Sedang	44	41,1	41,1
72-97	Tinggi	60	56,1	56,1
Total		107	100,0	100,0

Berdasarkan tabel 4.2 di atas yang menunjukkan jawaban responden dalam hal ini adalah taruna yang berasal dari PIP Makassar diperoleh 2,8% atau terdapat 3 responden dengan jawaban yang menunjukkan bahwa penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada PIP Makassar masih rendah, 41,1% atau 44 responden dengan jawaban yang menunjukkan bahwa penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada PIP Makassar berada pada kategori sedang dan sebanyak 56,1% atau 60 responden dengan jawaban yang menunjukkan bahwa penerapan

rancangan sistem penjaminan mutu pada PIP Makassar telah berada pada kategori tinggi.

Selanjutnya yaitu untuk tanggapan dosen dan staf PIP Makassar mengenai penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada PIP Makassar. Adapun gambaran mengenai distribusi jawaban dosen dan staf PIP Makassar dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3. Distribusi Jawaban Dosen dan Staf PIP Makassar
Intotal

	Skor	Kategori	Frequency	Percent	Valid Percent
	20-45	Rendah	0	0	0
Valid	46-71	Sedang	23	23,0	23,0
	72-97	Tinggi	77	77,0	100,0
	Total		100	100,0	100,0

Berdasarkan tabel 4.3 di atas yang menunjukkan jawaban responden dalam hal ini adalah dosen dan staf PIP Makassar diperoleh 23% atau terdapat 23 responden dengan jawaban yang menunjukkan bahwa penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada PIP Makassar berada pada kategori sedang dan sebanyak 77% atau 77 responden dengan jawaban yang menunjukkan bahwa penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada PIP Makassar telah berada pada kategori tinggi.

2. Deskripsi Penelitian Berdasarkan Sampel yang Berasal STIP Jakarta

Deskripsi penelitian berdasarkan sampel yang berasal dari STIP Jakarta bertujuan untuk membandingkan hasil penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada PIP Makassar dengan penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada STIP Jakarta. Adapun hasil distribusi jawaban berdasarkan taruna STIP Jakarta yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4. Distribusi Jawaban Taruna STIP Jakarta
Intotal

	Skor	Kategori	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	20-45	Rendah	3	2,8	2,8
	46-71	Sedang	20	18,7	18,7
	72-97	Tinggi	84	78,5	78,5
	Total		107	100,0	100,0

Berdasarkan tabel 4.4 di atas yang menunjukkan jawaban responden dalam hal ini adalah taruna yang berasal dari STIP Jakarta diperoleh 2,8% atau terdapat 3 responden dengan jawaban yang menunjukkan bahwa penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada STIP Jakarta masih rendah, 18,7% atau 20 responden dengan jawaban yang menunjukkan bahwa penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada STIP Jakarta berada pada kategori sedang dan sebanyak 78,5% atau 84 responden dengan jawaban yang menunjukkan bahwa penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada STIP Jakarta telah berada pada kategori tinggi.

Selanjutnya yaitu untuk tanggapan dosen dan staf STIP Jakarta mengenai penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada STIP Jakarta. Adapun gambaran mengenai distribusi jawaban dosen dan staf STIP Jakarta dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5. Distribui Jawaban Dosen dan Staf STIP Jakarta
Intotal

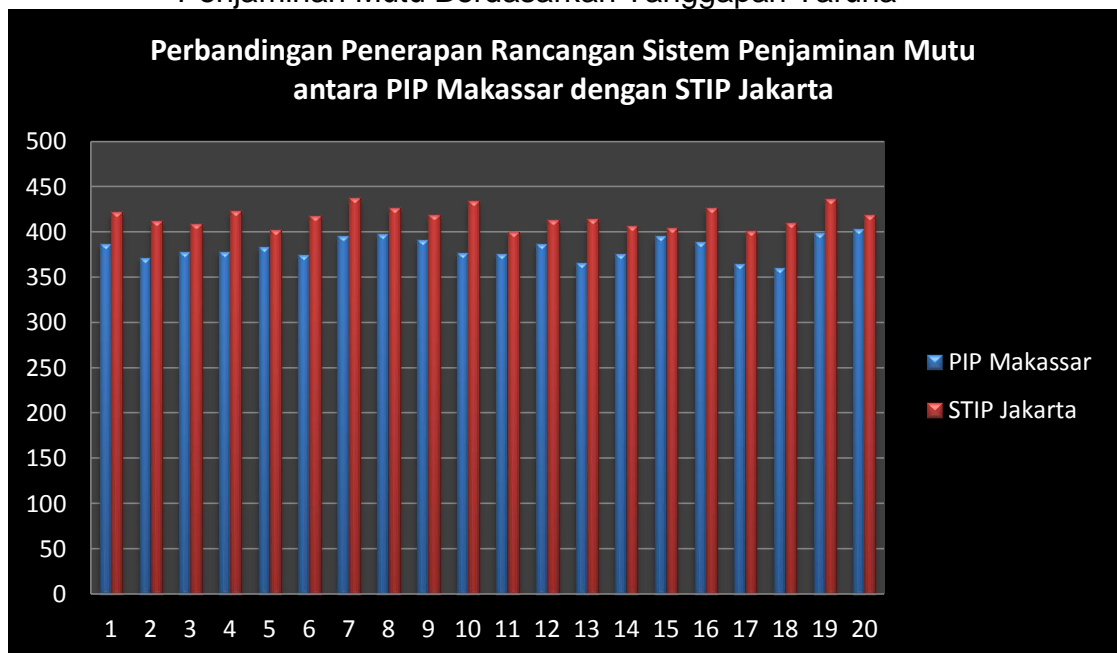
	Skor	Kategori	Frequency	Percent	Valid Percent
	20-45	Rendah	0	0	0
Valid	46-71	Sedang	19	19,0	19,0
	72-97	Tinggi	81	81,0	81,0
	Total		100	100,0	100,0

Berdasarkan tabel 4.5 di atas yang menunjukkan jawaban responden dalam hal ini adalah dosen dan staf STIP jakarta diperoleh 19,0% atau terdapat 19 responden dengan jawaban yang menunjukkan bahwa penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada STIP Jakarta berada pada kategori sedang dan sebanyak 81,0% atau 81 responden dengan jawaban yang menunjukkan bahwa penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada STIP Jakarta telah berada pada kategori tinggi.

3. Hasil Perbandingan Penerapan Rancangan Sistem penjaminan mutu pada PIP Makassar dengan Penerapan Rancangan Sistem penjaminan mutu pada STIP Jakarta

Untuk melihat sejauh mana penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada PIP Makassar jika dibandingkan dengan sekolah tinggi ilmu peelayaran lainnya. Maka peneliti membuat diagram perbandingan penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada PIP Makassar dengan penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada STIP Jakarta berdasarkan tanggapan responden baik dari taruna maupun dosen dan staf dari masing-masing sekolah tinggi tersebut. Adapun diagram perbandingan yang diperoleh dari tanggapan taruna mengenai penerapan rancangan sistem penjaminan mutu yaitu sebagai berikut:

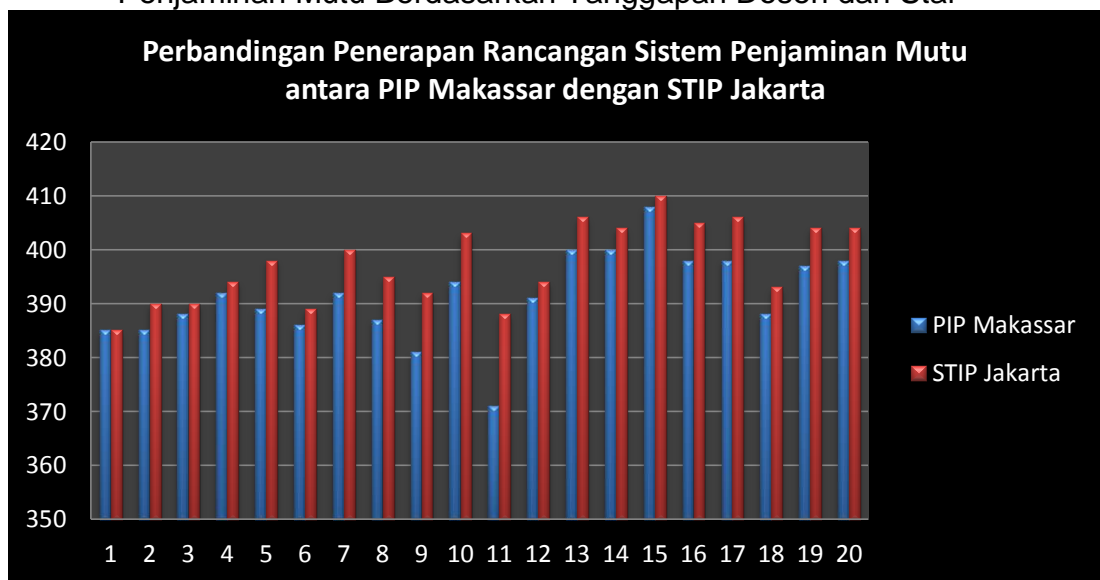
Gambar 4.1. Diagram Hasil Perbandingan Penerapan Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Berdasarkan Tanggapan Taruna



Dari gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan tanggapan taruna STIP Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan tanggapan taruna PIP Makassar. Selanjutnya jika dinjau dari pernyataan yang memiliki tanggapan yang paling rendah, maka untuk tanggapan yang berasal dari taruna PIP Makassar diperoleh tanggapan yang paling rendah yaitu pada pernyataan nomor 18. Sedangkan tanggapan yang berasal dari taruna STIP Jakarta yang mendapatkan nilai paling rendah yaitu pada pernyataan nomor 11.

Selanjutnya yaitu perbandingan tanggapan dosen dan staf PIP Makassar dengan tanggapan dosen dan staf STIP Jakarta yang digambarkan melalui diagram sebagai berikut:

Gambar 4.2. Diagram Hasil Perbandingan Penerapan Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Berdasarkan Tanggapan Dosen dan Staf



Berdasarkan gambar 4.2 mengenai tanggapan dosen dan staf PIP Makassar pernyataan menunjukkan bahwa pernyataan 11 mendapatkan tanggapan paling rendah jika dibandingkan dengan tanggapan-tanggapan

pernyataan lainnya. Sedangkan berdasarkan tanggapan dosen dan staf STIP Jakarta pernyataan yang memiliki tanggapan paling rendah yaitu pernyataan nomor 1.

B. Pembahasan

Berdasarkan dari hasil distribusi tanggapan taruna PIP Makassar diperoleh 56,1% atau terdapat 60 taruna dari jumlah total 107 orang yang menjadi sampel penelitian dengan jawaban yang menunjukkan bahwa penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada PIP Makassar telah berada pada kategori tinggi. Selanjutnya terdapat 41,4% atau terdapat 44 taruna yang memiliki jawaban yang menunjukkan bahwa penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada PIP Makassar masih berada pada kategori sedang dan selebihnya yaitu 2,8% atau terdapat 3 taruna yang menyatakan bahwa penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada PIP Makassar masih berada pada kategori rendah.

Dari rincian hasil tanggapan taruna PIP Makassar tersebut di atas menunjukkan bahwa penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada PIP Makassar telah berada pada kategori tinggi meskipun masih terdapat beberapa taruna yang mempunyai tanggapan bahwa penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada PIP Makassar masih berada pada kategori sedang bahkan rendah. Sedangkan tanggapan dosen dan staf PIP Makassar mengenai penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada PIP Makassar tidak berbeda jauh dengan tanggapan dari para taruna. Hal tersebut terbukti dari hasil tabel 4.3. Dimana pada tabel

tersebut terlihat bahwa para dosen dan staf PIP lebih banyak memiliki jawaban dengan kategori tinggi dibanding dengan kategori lainnya. Meskipun demikian jika pada hasil tanggapan taruna masih diperoleh jawaban yang berada pada kategori rendah, namun pada tanggapan dosen dan staf tanggapan mengenai penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada PIP Makassar hanya terbagi pada dua kategori yaitu kategori sedang dan kategori tinggi. Pada kategori sedang sebesar 23% atau 23 responden dari 100 staf dan dosen yang jawaban mereka pada pada kategori sedang tersebut dan selebihnya yaitu 77% dengan jawaban pada kategori tinggi.

Jika seluruh tanggapan taruna, dosen dan staf PIP Makassar digabung maka hasilnya tidak berbeda jauh dari penjelasan sebelumnya yaitu terdapat dua pernyataan yang memiliki tanggapan yang masih perlu ditingkatkan yaitu upaya PIP untuk menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar untuk memenuhi kebutuhan *stakholder* serta untuk memenuhi kebutuhan orang tua taruna dengan baik.

Sedangkan untuk kegiatan pengumpulan data dan informasi di perguruan tinggi telah terlaksana dengan baik. Pernyataan tersebut juga saling berkaitan dengan pernyataan lainnya yaitu ketersediaan basis data akurat yang dapat digunakan pada setiap pengambilan keputusan sehingga data dan informasi berjalan sesuai standar penjaminan mutu perguruan tinggi. Sehingga tingginya tanggapan pernyataan tersebut

memberikan dampak positif terhadap ketersediaan sistem penjaminan mutu informasi dan sistem penjaminan mutu pendukung keputusan yang terintegrasi dan penyimpanan data serta informasi tentang perguruan tinggi yang telah memenuhi SNP.

Tingginya tanggapan responden terhadap pernyataan yang berkaitan dengan ketersediaan basis data yang telah sesuai dengan SNP tidak terlepas dari peran serta civitas akademika dan seluruh tenaga kependidikan dalam PIP dalam pelaksanaan penjaminan mutu suatu perguruan tinggi. PIP Makassar juga telah melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman seluruh civitas terhadap pentingnya mutu suatu perguruan tinggi sehingga seluruh civitas terlibat dalam proses pelaksanaan penjaminan mutu tersebut.

Dari hasil tanggapan responden juga memberi gambaran bahwa penetapan standar pendidikan di PIP Makassar telah sesuai dengan standar dikti dan mendapatkan penilaian kelayakan oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang diakui Pemerintah. Selanjutnya PIP Makassar juga telah menghasilkan keluaran yang siap terjun didunia kerja. Kesiapan taruna terjun di dunia kerja diperkuat dengan salah satu berita yang dilansir Liputan6.com, Jakarta bahwa taruna akan menjadi pelaut profesional dengan profesi yang asyik dan menjanjikan. Bagaimana tidak lapangan kerjanya begitu luas karena secara teritorial lautan lebih luas daripada daratan, berbanding 71 persen lautan dan 29 persendaratan. Hal tersebut menjadi salah satu motivasi

taruna untuk lebih giat mempersiapkan bekal untuk terjun dalam dunia kerja.

Untuk melihat sejauh mana penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada PIP Makassar dibanding dengan sekolah pelayaran lainnya, maka peneliti menjadikan STIP Jakarta sebagai sampel penelitian perbandingan. Hal tersebut bertujuan untuk membandingkan hasil tanggapan taruna PIP Makassar dengan taruna STIP Jakarta dan tanggapan dosen dan staf PIP Makassar dengan dosen dan staf STIP Jakarta mengenai penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada instansi mereka masing-masing dengan jumlah responden untuk taruna masing-masing 107 orang dan untuk dosen dan staf masing-masing dengan jumlah responden sebanyak 100 orang.

Dari tabel 4.4 diperoleh 2,8% atau terdapat 3 responden dengan jawaban yang masih rendah, 18,7% atau 20 responden dengan jawaban yang menunjukkan bahwa penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada STIP Jakarta berada pada kategori sedang dan sebanyak 78,5% atau 84 responden dengan jawaban yang menunjukkan bahwa penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada STIP Jakarta telah berada pada kategori tinggi.

Jika membandingkan hasil perolehan pada tabel 4.3 dan tabel 4.4 menunjukkan bahwa penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada STIP Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan penerapan rancangan

sistem penjaminan mutu pada PIP Makassar. Hasil yang sama juga di tunjukkan pada gambar 4.1 dan gambar 4.2.

Berdasarkan gambar tersebut di atas menunjukkan bahwa meskipun penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada PIP Makassar telah berada pada kategori tinggi namun jika dibandingkan penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada STIP Jakarta maka penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada PIP Makassar masih perlu ditingkatkan lagi. Dari gambar tersebut juga menunjukkan bahwa pada seluruh item yang menggambarkan penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada STIP Jakarta secara keseluruhan lebih tinggi dibanding tanggapan taruna PIP mengenai penerapan rancangan sistem penjaminan mutu pada PIP Makassar.

Selanjutnya masih pada gambar 4.1 juga menunjukkan bahwa dari tanggapan taruna PIP Makassar mengenai setiap pertanyaan yang ada, pernyataan nomor 18 memiliki tanggapan paling rendah dibanding dengan tanggapan pernyataan lainnya. Berdasarkan lampiran 1, pernyataan nomor 18 berkaitan dengan upaya PIP Makassar untuk memenehui kebutuhan orang tua taruna dengan baik. Sedangkan untuk tanggapan taruna STIP Jakarta, pernyataan nomor 11 memiliki tanggapan yang paling rendah jika dibandingkan dengan pernyataan lainnya. Meskipun jika dibandingkan dengan tanggapan taruna PIP Makassar, tanggapan taruna STIP Jakarta tersebut masih lebih tinggi. Pernyataan nomor 11 tersebut berkaitan dengan kemampuan menerapkan, mengendalikan, dan

mengembangkan sejumlah standar untuk memenuhi kebutuhan *stakholder*.

Jika dikaitkan dengan pernyataan nomor 11 dengan pernyataan 18, kedua pernyataan tersebut memiliki kesamaan yaitu masing-masing berkaitan dengan usaha sekolah tinggi pelayaran untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkaitan dengan sekolah tinggi pelayaran tersebut.

Rendahnya tanggapan responden terhadap pernyataan nomor 11 dan 18 harus mendapatkan perhatian lebih lanjut dari pihak sekolah tinggi pelayaran. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan penjaminan mutu sebuah perguruan tinggi termasuk PIP Makassar.

Sedangkan dari gambar 4.2 pernyataan yang memiliki tanggapan yang rendah dibandingkan dengan pernyataan lainnya berdasarkan tanggapan dosen dan staf PIP Makassar yaitu pada nomor 1. Pernyataan pada nomor 1 berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi di perguruan tinggi tempat responden bekerja. Rendahnya tanggapan tersebut dibanding tanggapan pernyataan lainnya bukan berarti bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi di PIP Makassar belum berjalan dengan baik, melainkan pengumpulan data dan informasi di PIP Makassar tersebut harus lebih ditingkatkan agar lebih sempurna lagi. Sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat mengakses data penting sesuai dengan peruntukannya.

5. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gambaran sistem penjaminan mutu PIP Makassar dan STIP Jakarta dilaksanakan mengacu prinsip sesuai dengan pengertian Penjaminan Mutu (quality assurance) pendidikan tinggi yaitu: proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan secara konsisten. Sedangkan implementasi sistem penjaminan mutu pada PIP Makassar dilaksanakan melalui siklus yang dikembangkan oleh Edward Deming dan dikenal dengan siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action). Siklus PDCA menjamin terlaksananya prinsip peningkatan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement), yang mengandung makna bahwa jika suatu aktivitas sudah mencapai standar yang ditetapkan, maka standar untuk aktivitas tersebut akan ditingkatkan lagi.
2. Penerapan sistem penjaminan mutu PIP Makassar dan STIP Jakarta masih dalam tahap pengembangan. Hal tersebut disebabkan implementasinya siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) masih menghadapi beberapa kendala diantaranya kesadaran individu tentang budaya mutu masih harus ditingkatkan, demikian pula dengan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang baik. Selain itu kegiatan pengumpulan data perguruan tinggi secara online masih perlu dibenahi agar informasi dan tugas pokok dan fungsi masing-masing saling terintegrasi

B. Saran

1. Dengan diterapkannya siklus PDCA menjamin terlaksananya prinsip peningkatan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement), maka diharapkan kepada seluruh civitas akademika PIP Makassar dan STIP Jakarta untuk mencapai standar yang telah ditetapkan.

2. Diharapkan kepada seluruh civitas akademika untuk meningkatkan standar penjaminan mutu dan pemahaman terhadap pentingnya mutu suatu perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Permeniknas No 19 Tahun 2005. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*.
- [2]. Permendiknas Tahun 2009. *Sistem Penjaminan Mutu*.
- [3]. Sevima. (2017, Juli Senin). *Berita dan Artikel*. Dipetik Februari Rabu, 2018, dari Berita dan Artikel: <http://sevima.com/pentingnya-sistem-penjaminan-mutu-internal-untuk-akreditasi-perguruan-tinggi/>
- [4]. Sugeng Listyo & Prabowo. (2009). *Implementasi Manajemen Mutu*. Malang: UIN Malang Press.
- [5]. Undang Undang No 12 tahun 2009 tentang *Pendidikan Tinggi*